

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Oleh:

Loli Noveli

2263201031

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling* yang terdiri atas aparatur Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), pemerintah desa, serta pihak terkait. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Penelitian ini menggunakan teori *Policy Capacity* dari Wu, Howlett, dan Ramesh (2018) yang meliputi kapasitas analitis, kapasitas operasional, dan kapasitas politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Bengkulu Selatan telah berjalan dengan baik. Kapasitas analitis ditunjukkan melalui pelaksanaan verifikasi, validasi, dan pemadanan data sesuai ketentuan. Kapasitas operasional didukung oleh sumber daya manusia, sistem informasi, sarana prasarana, serta prosedur kerja yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Kapasitas politik ditunjukkan melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan OPD terkait dalam proses pemutakhiran data.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Bengkulu Selatan telah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi sistem informasi, dan penguatan koordinasi antarlembaga perlu terus dilakukan guna menjaga kualitas data sosial ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpadu.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), *Policy Capacity*, Kesejahteraan Sosial.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL INTEGRATED SOCIOECONOMIC DATA (DTSEN) UPDATING POLICY IN SOUTH BENGKULU REGENCY

By:

Loli Noveli

2263201031

This study aimed to describe and analyze the implementation of the National Integrated Socioeconomic Data (DTSEN) updating policy in South Bengkulu Regency.

This study employed a qualitative method with a descriptive approach. The research informants were selected using purposive sampling and included officials from the Social Affairs Office, Statistics Indonesia (BPS), the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil), village governments, and other relevant stakeholders. The data were collected through observations, interviews, and documentation and analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana interactive analysis model. The study adopted the Policy Capacity framework developed by Wu, Howlett, and Ramesh (2018), which comprises analytical capacity, operational capacity, and political capacity.

The findings indicate that the implementation of the National Integrated Socioeconomic Data (DTSEN) updating policy in South Bengkulu Regency has been carried out effectively. Analytical capacity was demonstrated through data verification, validation, and matching processes conducted in accordance with established regulations. Operational capacity was supported by adequate human resources, information systems, infrastructure, and work procedures that facilitated policy implementation. Political capacity was reflected in the coordination among the central government, local government, village governments, and relevant regional government agencies through the data updating process. Based on these findings, it can be concluded that the implementation of the National Integrated Socioeconomic Data (DTSEN) updating policy in South Bengkulu Regency has been successfully implemented. Therefore, continuous efforts to enhance the capacity of government personnel, optimize information systems, and strengthen inter-agency coordination are essential to maintain accurate, up-to-date, and integrated socioeconomic data.

Keywords: Policy Implementation, National Integrated Socioeconomic Data (DTSEN), Policy Capacity, Social Welfare

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pesat teknologi informasi dan sistem digital telah membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan modern. Hammer dan Champy (1993, dalam Andriani et al., 2023) menjelaskan bahwa teknologi informasi merupakan aset penting bagi organisasi publik karena mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta transparansi birokrasi. Dalam konteks administrasi publik, penerapan sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif publik, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dimana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi prinsip utama (Wahono, 2024).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menegaskan upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pendataan sosial dengan menekankan digitalisasi sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas data kesejahteraan. DTKS adalah basis data nasional yang berisi profil rumah tangga miskin dan rentan yang digunakan sebagai standar utama untuk penyaluran bantuan sosial. Widyaningsih et al. (2023) menemukan bahwa banyak pemerintah daerah belum mampu menjamin bahwa datanya benar dan sinkronis secara berkala, yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam pembagian bantuan sosial.

Selain itu, ada beberapa faktor yang menghambat kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), termasuk proses verifikasi yang berlapis dan ketergantungan pada mekanisme manual. Kondisi ini menunjukkan bahwa

peningkatan pendataan sosial memerlukan persiapan teknis yang lebih baik, peningkatan kemampuan aparatur, dan sistem informasi yang lebih terintegrasi di tingkat daerah. Dalam situasi seperti ini, ada kemungkinan terjadi kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Kesalahan inclusion termasuk rumah tangga yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima, atau kesalahan exclusion termasuk rumah tangga miskin yang layak tetapi tidak terdata sehingga tertinggal dari program (Sius et al., 2024).

Dalam kehidupan nyata, efeknya dapat mencakup bantuan sosial menjadi tidak tepat sasaran, anggaran pemerintah menjadi kurang efektif, dan kepercayaan masyarakat pada program sosial menurun (Manoppo et al., 2022). Karena itu berbagai penelitian menyimpulkan bahwa regulasi saja tidak cukup, dibutuhkan kapasitas teknis, kualitas tata kelola data yang baik, serta komitmen pembaruan data secara rutin agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat benar-benar menjadi instrumen yang andal dalam mengurangi kemiskinan dan kerentanan nasional (Agnia & Wahab Sya'roni, 2023).

Sebagai langkah lebih maju dalam reformasi pendataan sosial, pemerintah memperkenalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) sebagai upaya integrasi berbagai sumber data, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pendataan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Setyanto (2025) menjelaskan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dirancang sebagai satu basis data nasional yang dapat digunakan untuk seluruh program pembangunan sosial ekonomi, sehingga mengurangi tumpang tindih data dan meningkatkan efisiensi kebijakan

publik.

Pembentukan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) juga didasarkan pada kebutuhan untuk menyatukan berbagai basis data sektoral yang selama ini berjalan sendiri-sendiri dan seringkali tidak sinkron. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 menetapkan inisiatif ini, mewajibkan semua departemen dan lembaga untuk menggunakan DTSEN sebagai sumber data tunggal saat merencanakan dan menyebarkan program sosial. Instruksi ini juga mewajibkan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa data sosial ekonomi konsisten dan akurat (Bappenas, 2025).

Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) dibentuk karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dinilai belum mampu menyediakan data sosial ekonomi yang komprehensif. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hanya berfokus pada data kesejahteraan sosial dan target rumah tangga miskin, sedangkan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) mencakup dimensi yang lebih luas seperti kondisi perumahan, akses pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan karakteristik sosial ekonomi lainnya. Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) juga disusun berbasis individu dan keluarga menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga memiliki tingkat presisi lebih tinggi dibandingkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih banyak bergantung pada mekanisme pengusulan manual dari desa/kelurahan.

Perbedaan mendasar ini menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) lebih adaptif sebagai basis kebijakan nasional. Regulasi pelaksanaannya diperkuat melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang

Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi, yang mengatur mekanisme integrasi, pemutakhiran, serta penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh berbagai lembaga pemerintah (Kemensos, 2025).

Aini (2025) menekankan bahwa sumber daya manusia yang kurang, kesalahan input data, dan kurangnya koordinasi lintas sektor adalah beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di daerah. Hal-hal ini menunjukkan bahwasanya keberhasilan dalam DTSEN itu bergantung pada kesiapan pelaksana utama kebijakan di daerah.

Di tingkat daerah, Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu wilayah yang telah mulai mengimplementasikan kebijakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sejak tahun 2025. Dinas Sosial Provinsi Bengkulu menetapkan bahwa seluruh Kabupaten/Kota di Bengkulu harus melakukan transisi penuh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai strategi penguatan basis data sosial (S, Endang 2025). Dalam implementasinya Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) menjadi instrumen utama dalam pengelolaan dan pemutakhiran data penerima manfaat secara daring.

Penelitian Andriani et al., (2023) menunjukkan bahwa penggunaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Kabupaten Bengkulu Selatan telah meningkatkan efektivitas pengelolaan data kemiskinan, meskipun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur digital dan kapasitas teknis petugas lapangan.

Berdasarkan dalam Badan Pusat Statistik (2025), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2024 mencapai 31,80 ribu jiwa dengan kemiskinan sebesar Rp. 492.627 per kapita per bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan masih memerlukan perhatian serius dan membutuhkan dukungan basis data yang akurat. Data penerima Bantuan Sosial Pangan (BANSOS PANGAN) berikut memberikan gambaran mengenai dinamika perubahan jumlah penerima manfaat selama tahun 2022 hingga 2024 yang sebelumnya menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebelum penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada tahun 2025.

Tabel.1.1 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Tahun	Periode	Basis Data	Rencana KPM	Realisasi KPM
2022	-	DTKS	99.746	88.755
2023	-	DTKS	81.906	80.220
2024	-	DTKS	52.774	51.840

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu 2022-2024

Memasuki tahun 2025, dinamika jumlah penerima bantuan sosial menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Perubahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh proses pemutakhiran data, tetapi juga oleh peralihan basis data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Untuk melihat dinamika tersebut secara lebih rinci dapat diperhatikan pada tabel 1.2

Tabel 1.2 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Tahun	Periode	Basis Data	Rencana KPM	Realisasi
-------	---------	------------	-------------	-----------

2025	Jan-Mar	DTKS	-	13.673
2025	Apr-Juni	DTSEN	-	16.122
2025	Juli-Sept	DTSEN	-	15.811
2025	Okt-Des	DTSEN	-	15.625
2026	Jan-Mar	DTSEN	-	16.833

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2026

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat bahwa pada periode Januari-Maret 2025 yang masih menggunakan basis data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jumlah realisasi penerima bantuan sosial pangan tercatat sebanyak 13.673 KPM. Selanjutnya, pada periode April-Juni 2025 setelah mulai diterapkannya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), jumlah penerima mengalami peningkatan menjadi 16.122 KPM.

Pada periode berikutnya, yaitu Juli-September 2025, jumlah realisasi penerima tercatat sebanyak 15.811 KPM, yang menunjukkan adanya sedikit penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, pada periode Oktober-Desember 2025, jumlah penerima kembali mengalami penurunan menjadi 15.625 KPM. Selanjutnya, pada periode Januari-Maret 2026, jumlah penerima mengalami peningkatan kembali menjadi 16.833 KPM. Fluktuasi jumlah penerima bantuan sosial pangan tersebut menunjukkan bahwa proses pemutakhiran dan penyesuaian data berbasis Data Tunggal Satuan Ekonomi Nasional (DTSEN) masih berlangsung secara dinamis. Perubahan jumlah penerima pada setiap periode mencerminkan adanya proses verifikasi dan validasi data yang terus dilakukan guna meningkatkan akurasi serta ketepatan sasaran penerima bantuan sosial di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Lonjakan tersebut mengindikasikan bahwa integrasi data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berdampak langsung terhadap perubahan jumlah penerima manfaat, sekaligus menunjukkan perlunya validasi lanjutan untuk memastikan konsistensi dan akurasi data yang digunakan dalam penetapan bantuan sosial. Adapun data penerima bansos mengacu pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 tentang penetapan peringkat kesejahteraan keluarga untuk penyaluran bantuan sosial dan program kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial.

Selain perubahan kuantitatif pada jumlah penerima, berbagai permasalahan teknis juga muncul sepanjang implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ganda, ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan perbedaan antarinstansi masih menjadi kendala besar dalam penyediaan data tunggal. Dalam perspektif teori *Policy Capacity* sebagaimana dikemukakan oleh Wu, Howlett & Ramesh (2018), permasalahan tersebut menunjukkan bahwa aspek analitis, operasional, dan politik belum sepenuhnya terintegrasi di tingkat organisasi. Ketiga dimensi ketidakterpaduan tersebut menghambat pelaksanaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain itu, ketidakterpaduan ini meningkatkan kemungkinan ketidaktepatan sasaran dan ketidakselarasan kebijakan sosial di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ketidaktepatan dan ketidakkonsistenan data yang masih terjadi menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu menyediakan satu basis data nasional yang

valid dan terpadu dengan kondisi faktual implementasinya di daerah. Walaupun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dirancang untuk memperbaiki seluruh sistem pendataan sosial ekonomi, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan teknis, koordinasi kelembagaan, serta kesiapan infrastruktur pendukung. Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berdasarkan Uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “ **Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) di Kabupaten Bengkulu Selatan**”. Penelitian ini dipilih karena isu pemutakhiran data sosial ekonomi merupakan bagian penting dari kebijakan publik modern yang berbasis pada teknologi informasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas data kesejahteraan sosial sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menjadi penghambat implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Bengkulu Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pelaksanaan kebijakan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang Ilmu Administrasi Publik, khususnya mengenai implementasi kebijakan publik di sektor kesejahteraan sosial dan penerapan teknologi informasi pemerintahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang sistem informasi dan tata kelola data sosial.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, khususnya Dinas Sosial, dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan DTSEN. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi dan kebijakan daerah yang berorientasi pada peningkatan akurasi data sosial serta kesejahteraan masyarakat.

